

# Ribuan Botol Miras Dimusnahkan

SLAWI (KR) - Petugas Polres Tegal, memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai merek dan ukuran serta ratusan liter miras yang masih dalam jerigen. Pemusnahan barang haram itu pada Rabu (5/5) sore. Barang haram itu merupakan hasil sitaan dalam operasi cipta kondisi menjelang Idul Fitri tahun ini.



KR-Antara/Okny Lukmansyah

**Pekerja menggunakan alat berat memusnahkan minuman keras hasil sitaan selama Ramadan di Tegal.**

Kapolres Tegal, AKBP M Iqbal Simatupang mengatakan, pihaknya bersama Kodim 0712/Tegal dan Satpol PP telah melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Itu sebagai bentuk kegiatan imbalan dalam Operasi Ketupat Candi

2021. "Kegiatan yang kita lakukan yakni razia miras, petasan dan operasi pekat lainnya. Dan hari ini barang sitaan kami musnahkan," ujar Iqbal. Iqbal menambahkan,

hatan dan mematuhi larangan pemerintah untuk tidak mudik.

"Sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Tegal, masyarakat harus ikut mendukungnya," tegas Iqbal.

Iqbal menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 5.230 botol minuman keras berbagai merek dan 420 liter tuak. Itu merupakan hasil operasi cipta kondisi menjelang Idul Fitri 2021 yang dilaksanakan bersama Polsek Jajaran.

"Harapan kami di wilayah Kabupaten Tegal ke depannya bebas dari miras," tutur Iqbal. **(Ryd)-d**

# ANTISIPASI PENULARAN COVID-19 Tutup Tempat Wisata di Zona Merah

YOGYA (KR) - Pemda DIY telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 dan munculnya penambahan kasus atau klaster baru. Salah satunya dengan berupaya menerapkan kebijakan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu Pemda DIY mendukung adanya instruksi agar tempat-tempat wisata berada di zona merah dan oranye untuk tutup selama periode libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Lebaran 2021. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Selama kebijakan PPKM Mikro diterapkan, RT/RW yang masuk kategori zona merah dan oranye tak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan termasuk aktivitas wisata. Untuk itu jika ada kawasan wisata di zona merah maka kita akan melakukan penutupan karena RT/RW zona merah tidak boleh ada aktivitas yang da-

pat memicu terjadinya kerumunan," tandas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY K Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/5).

Menurut Baskara Aji, selain pengawasan dan tindakan pengetatan di daerah perbatasan selama kebijakan larangan mudik diberlakukan, aktivitas di daerah wisata juga menjadi fokus perhatian. Untuk itu jika suatu destinasi masuk di kawasan zona merah dan oranye diminta untuk tutup. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penularan terhadap pengunjung.

Untuk itu, diperlukan kesadaran dan dukungan pihak-pihak terkait. Dengan begitu kebijakan dalam PPKM Mikro akan bisa dilaksanakan dengan baik.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih melaporkan, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY, Rabu, mengalami penambahan 232 kasus menjadi 40.372. Kasus sembuh bertambah 261 menjadi 35.891. Sedangkan kasus meninggal bertambah enam kasus menjadi 987 kasus. **(Ria/Ira)-d**

## HASIL SELEKSI ASN

# KPK Tegaskan Tak Ada Pemecatan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tentang 75 pegawainya tidak memenuhi syarat dari hasil tes wawasan kebangsaan dalam rangka peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, tegas Ketua KPK Firlil Bahuri, hingga saat ini tidak ada pemecatan bagi 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan tersebut.

"Pada kesempatan ini, saya ingin katakan bahwa sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat, tidak ada," kata Firlil dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Untuk diketahui bahwa tes wawasan kebangsaan itu merupakan bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Firlil mengungkapkan bahwa lembaganya tunduk pada undang-undang sehingga sampai saat ini tidak niatan untuk memecat pegawai. Pasaunya, KPK sangat paham, KPK

pelaksana undang-undang, pelaksana peraturan undang-undang dan menjalankan secara lurus-lurusnya.

"Kami tunduk pada undang-undang sehingga sampai hari ini belum ada niat kesempatan ataupun keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai," kata Firlil.

Pada kesempatan ini Sekjen KPK Cahya H Harefa menyatakan, akan menerbitkan surat keputusan penetapan terhadap hasil asesmen tes wawasan kebangsaan untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat.

Selain itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut.

"Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tersebut," kata Cahya seraya menandaskan, KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang di-

nyatakan tidak memenuhi syarat sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN.

Sebelumnya KPK menyebutkan 75 pegawainya tidak memenuhi syarat dari hasil tes wawasan kebangsaan dalam rangka peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hari ini KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hasilnya, jelas Ghufron, pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang. Rangkaian asesmen tes wawasan kebangsaan, telah terlaksana dengan keterangan waktu sebagai berikut.

Tes tertulis indeks moderasi bernegara (IMB) dan integritas terlaksana pada tanggal 9-10 Maret 2021 dengan catatan pelaksanaan susulan pertama pada tanggal 16 Maret dan pelaksanaan susulan kedua pada tanggal 8 April 2021. **(Fu)-d**

## Waspadai

Pada Rabu (28/4) Malaysia mencatatkan 3.142 kasus baru menjadi yang tertinggi sejak 24 Februari 2021. Saat itu ketika kasus di Negeri Jiran menembus angka 3.000 yakni 3.545 orang. Sementara angka terbaru dari Worldometers, penambahan kasus baru sebanyak 3.120 orang sehingga totalnya 420.632 kasus.

Penambahan kasus itu bersamaan dengan peluncuran program vaksinasi nasional di mana Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerima suntikan vaksin.

Kemarin, dilaporkan juga ada 23 pasien meninggal. Ini membuat angka kematian di negara itu menjadi 1.574 kasus. Saat ini kasus aktif di

Malaysia sebanyak 31.516 kasus, dengan kondisi kritis sebanyak 338 orang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kesehatan Dr Noor Hisham Abdullah kasus baru banyak ditemukan di 13 negara bagian Malaysia dan tiga wilayah federal, kemudian Kelantan, Kuala Lumpur dan Sarawak. **(Jon/Ati)-f**

## Virus

Virus Korona merupakan jenis virus RNA. Sehingga berjalannya waktu akan terus berupaya untuk mempertahankan diri agar dapat hidup dengan cara melakukan mutasi. Justru sifat untuk terus bermutasi, akan meningkatkan risiko bahaya terhadap manusia. Ketika variasi mutasi tersebut mempengaruhi transmisi, virulensi, dan menurunkan efektivitas terapi termasuk vaksin, maka dapat digolongkan sebagai *variants of concern*.

Potensi mutasi virus akan semakin meningkat pada kondisi semakin banyaknya infeksi yang terjadi pada suatu populasi. Demikian yang terjadi di India, euforia terhadap vaksin sehingga mengabaikan protokol kesehatan, seperti kondisi keramaian berkumpulnya banyak orang bahkan hingga jutaan orang. Sebut saja adanya kampanye politik pada Maret-April yang lalu. Kemudian ada pertandingan kriket dan Kumbh Mela yang

merupakan acara ritual dengan jutaan orang berkumpul pada waktu yang sama dan sedikit dari mereka yang menggunakan masker dan mengabaikan jarak. Akhirnya timbulah gelombang kedua bahkan tsunami Covid-19 di India. Munculnya varian Corona B.1.617 dengan mutan ganda diyakini makin memperburuk situasi yang sifatnya semakin ganas, penularannya sangat cepat dan banyak pasien tidak berhasil selamat sebelum mendapatkan perawatan karena jumlah tempat tidur RS terbatas.

Laporan WHO menyebutkan sampai 27 April 2021, ada lebih dari 1.200 urutan (genom) telah diunggah di GISAID dan ditetapkan sebagai turunan B.1.617 dan berasal dari 17 negara." GISAID memberikan akses terbuka data genom virus influenza dan virus Korona. Sesuai penjelasan WHO, varian B.1.617 terdiri dari beberapa sub-garis keturunan, termasuk

B.1.617.1, B.1.617.2 dan B.1.617.3. Baik B.1.617.1 dan B.1.617.2. Varian ini pertama kali diidentifikasi di India pada Desember 2020, dan telah terdeteksi pada peningkatan prevalensi bersamaan dengan peningkatan kematian di negara tersebut.

Indonesia harus belajar dari kondisi di India, dengan membatasi masuknya orang asing. Jangan pernah lelah ataupun terlalu cepat euforia dan mengira pandemi sudah terkendali dengan vaksinasi saja. Protokol kesehatan 5 M (menutupi mulut, menggunakan handsanitizer, mengenakan masker, mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan) tetap perlu diperketat. Terlebih menjelang perayaan Idul Fitri dan liburan panjang. Kewaspadaan kita akan dapat menghentikan mutasi strain virus Korona dan keluar dari derita pandemi ini. **(Penulis adalah Dekan FK UII)-f**

## Polres

"Selama ini perempuan tersebut bekerja di rumah kecantikan, bukan di salon. Warga masyarakat di sini kaget dengan peristiwa

Sambungan hal 1

## Sultan

masuk ke lingkungan setempat harus memperhatikan protokol kesehatan, terutama memakai masker," katanya.

Berkerumun, lanjut Sultan, saat ini menjadi salah satu penyebab utama penyebaran Covid-19. Pembawa virus tidak selalu datang dari luar kota, karena sekarang itu sudah di lingkungan keluarga. Untuk itu, sangat penting menjaga proteksi.

Larangan berkerumun, tandas Sultan, tidak hanya berlaku di lingkungan keluarga saja, namun juga di ruang publik, seperti pusat perbelanjaan, hotel atau restoran hingga pasar tradisional.

Sultan pun menyatakan, tidak segan menutup ruang publik tersebut jika abai terhadap protokol kesehatan atau berimbas pada zonasi Covid-19. Apalagi mereka memiliki organisasi yang tentu saja su-

Sambungan hal 1

dah ada kesepakatan sebelum operasional.

"Mereka pasti sudah memiliki prosedur operasional standar atau SOP sendiri. Asosiasi mal, PHRI, Asita hingga pasar tradisional. Asal kita mau, maka yang buat SOP itu dapat menertibkan anggotanya sendiri. Karena sebelum beroperasi, pasti ada SOP-nya. Jika melanggar, organisasi tersebut dapat menegur anggotanya sendiri. Ini masalah kepedulian. Begitu sampai (zonasi) merah, ya tak tutup. Kan gitu," jelasnya.

Sultan menegaskan jika aturan tersebut juga berlaku di pasar tradisional. Karena di sana pasti ada lurah pasar. "Kenapa ngono kok ndadak dielingke. Wis ngerti tanggung jawabe bahwa berkerumun itu tidak boleh," tegasnya. **(Awh/Bro)-d**

## 18,9 Juta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang menunjukkan sebanyak 18 juta orang atau sekitar 7 persen masyarakat akan tetap mudik meski ada kebijakan larangan mudik pada Lebaran 2021 atau Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Dalam diskusi daring FMB9 bertajuk 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik', Budi menjelaskan, dalam survei tersebut terungkap bahwa jika tidak ada larangan mudik, sebanyak 33 persen masyarakat akan mudik. Kemudian, jumlahnya menurun ketika ada opsi larangan menjadi sebanyak 11 persen.

"Setelah dilakukan pelarangan, turun jadi 7 persen. Itu pun cukup banyak yaitu 18 juta. Kita, Satgas, selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi tiada henti agar yang 7 persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit sehingga kita bisa memanggulangi ide dan teknis kebijakan, serta sinergitas birokrasi daerah-birokrasi desa agar desa pintar yang ada selaras dengan smart city yang dikembangkan daerah. Langkah yang terakhir dan ini sangat penting adalah pemerintah desa mau dan mampu menerapkan smart village sebagai gaya baru birokrasi dan inovasi layanan publik di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Harapannya adanya smart village ini mampu menjadi solusi problem masyarakat di situasi pandemi Covid-19 sembari mendukung terealisasinya Desa SDGs. (\*)

Sambungan hal 1



Prakiraan Cuaca Kamis, 6 Mei 2021					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul				24-31	60-95
Sleman				23-31	65-95
Wates				24-31	60-95
Wonosari				23-31	65-95
Yogyakarta				23-31	65-95



**Muhammad Zuhdan, S.I.P.M.A**  
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

Smart village atau istilah lainnya sering juga disebut 'desa pintar' atau 'desa cerdas' telah menjadi wacana inovasi pemerintahan desa sejak beberapa tahun ini. Smart village seringkali dikaitkan dengan bagaimana sebuah desa mampu menciptakan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses kerja birokrasi maupun layanan publiknya. Tentu istilah smart village

# Membangun Smart Village Itu Mudah, Apa Langkahnya?

ini makin diminati untuk dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah, NGO, praktisi, maupun akademisi. Hal ini seiring dengan perubahan cara kerja pemerintahan kita dari manual ke digital, maupun perubahan budaya komunikasi masyarakat kita dari oral ke digital. Perubahan budaya tersebut kian mendorong pemerintah desa hari ini bisa selaras dengan gaya hidup digital masyarakat pada umumnya. Smart village juga makin dibutuhkan oleh publik ketika pandemi Covid-19 ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Pandemi Covid-19 ini membuat hampir sebagian besar orang ingin menjaga jarak maupun menghindari kerumunan, demi menjaga kesehatan dari penyebaran Covid-19. Sisi lain, protokol pemerintah atas Covid-19 ini berlaku dimana-mana dan secara otomatis ruang gerak orang

makin terbatas. Smart village menjadi salah satu inovasi pemerintahan di level desa yang diharapkan mampu menjawab solusi problem masyarakat desa akibat pandemic Covid-19 ini. Langkah-langkah membangunnya sebagai berikut. Pertama, memahami payung regulatifnya. Keberadaan smart village masih tetap dalam payung Undang-Undang Desa (UU No 16/2014 Tentang Desa). Untuk membangun dan mencipta bentuknya sangat tergantung dengan daya kreatifitas dari masing-masing desa. Daya kreativitas desa tersebut meliputi bagaimana sebuah pemerintahan desa mampu menerjemahkan regulasi dan anggaran yang ada, membangun infrastruktur digital dan juga mencipta segala platform digital yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Infrastruktur

digital maupun beragam platform digital tersebut tentu saja juga harus didukung oleh kapasitas aparatur desa dalam mengoperasikan semuanya sembari juga melakukan literasi digital kepada masyarakat desa agar bisa partisipasi aktif. Kedua, memahami rancang teknis infrastruktur digital dan tingkat literasi digital masyarakatnya. Untuk mencipta dan menerapkan smart village memang rumit, tetapi semua itu akan mudah jika dilakukan dengan kerja kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Ketiga aktor tersebut memiliki kapasitas masing-masing dalam mendukung terciptanya smart village. Pemerintah desa memiliki daya dukung regulatif, infrastruktur, anggaran, dan aparatur. Masyarakat desa memiliki modal sosial untuk menggerakkan literasi digital mendukung desa pintar. Dan

perguruan tinggi memiliki kapasitas ahli untuk mendesain dan mencipta beragam kebutuhan infrastruktur dan platform digital yang dibutuhkan oleh desa. Selain itu perguruan tinggi juga memiliki kapasitas konsultansi dan pendampingan jika dibutuhkan oleh desa dalam mengoperasikan smart village tersebut. Ketiga, menggalang sinergi dan koordinasi stakeholder. Sinergis vertikal maupun horizontal antar kelembagaan pemerintah maupun dengan sektor swasta juga menjadi syarat penting untuk menjalankan smart village tersebut. Setidaknya ada tiga kementerian sebagai pemanku kepentingan atas keberadaan smart village ini, yaitu Kemendagri, Kemendes PDTT, dan Kemenkominfo. Kelebihan lembaga kementerian adalah soal ide perencanaan, penganggaran dan juga rentang kendali wilayah



kebijakan atau program. Smart village butuh tangan-tangan teknokrat kebijakan dari ketiga kementerian tersebut agar regulasi, ide, dan operasional bisa selaras secara vertikal. Kemudian di level pemerintah daerah tentu saja desa pintar juga butuh dukungan regulasi, ide dan teknis kebijakan, serta sinergitas birokrasi daerah-birokrasi desa agar desa pintar yang ada selaras dengan smart city yang dikembangkan daerah. Langkah yang terakhir dan ini sangat penting adalah pemerintah desa mau dan mampu menerapkan smart village sebagai gaya baru birokrasi dan inovasi layanan publik di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Harapannya adanya smart village ini mampu menjadi solusi problem masyarakat di situasi pandemi Covid-19 sembari mendukung terealisasinya Desa SDGs. (\*)